

RENJA 2019 ALOKASI ANGGARAN	Volume	2019
Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah	535	105.654.656.000
Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Adil Dan Transparan		
<i>1. Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks Williamson)</i>	<i>0,58</i>	
<i>2. Rasio PDRD Terhadap PDRB</i>	<i>2,65</i>	
<i>3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan</i>	<i>4,40</i>	
<i>4. Persentase Belanja Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Dana Desa untuk Kemiskinan terhadap transfer ke daerah dan dana desa</i>	<i>75%</i>	
Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Layanan Dana Perimbangan	11	7.754.844.000
Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dana perimbangan yang		
Rasio Belanja Infrastruktur dari dana transfer umum dan dana transfer khusus terhadap total belanja APBD	<i>15%</i>	
Kebijakan Dana Perimbangan	8	5.862.718.000
<i>1. Indeks Penyelesaian Peraturan di Bidang Dana Perimbangan</i>	<i>100%</i>	
<i>2. Persentase Penyelesaian Kajian Yang Disetujui oleh pejabat Eselon II</i>	<i>100%</i>	
<i>3. Persentase Alokasi Dana Perimbangan Bidang Kesehatan terhadap total Dana Perimbangan Earmarked</i>	<i>10%</i>	
<i>4. Persentase Alokasi DAK Infrastruktur, Transprotasi, Sarana Prasaranan Dasar, dan Kedaulatan Pangan terhadap seluruh Alokasi DAK</i>	<i>88%</i>	
Tanpa Sub Output		
1. Perencanaan dan Penyusunan Resource Envelope Kebijakan dana perimbangan	1	184.228.000
2. Pengolahan Data dan Pembahasan dengan Stakeholder	4	575.485.000
3. Penghitungan Alokasi Dana Perimbangan	4	884.578.000
4. Penetapan Alokasi dan Penyusunan Peraturan tentang Dana Perimbangan	5	1.442.882.000
5. Penyusunan Kajian tentang Dana Perimbangan	15	227.675.000
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dana Perimbangan	4	1.102.820.000
7. Penyempurnaan Konsepsi RUU tentang HPKPD	2	1.445.050.000
Layanan Dana Perimbangan	3	1.892.126.000
<i>1. Persentase pencapaian output DBH CHT pada dukungan Jaminan Kesehatan Nasional terhadap penyerapan DBH CHT</i>	<i>80%</i>	
<i>2. Persentase Belanja Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</i>	<i>70%</i>	
1. Verifikasi Penyaluran Dana Perimbangan	2	379.348.000
2. Rekonsiliasi Penggunaan DBH	1	209.154.000
3. Informasi, Komunikasi dan Edukasi Dana Perimbangan	1	1.303.624.000
Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan	32	4.692.347.000
Mewujudkan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyelenggaraan SIKD		
<i>Persentase Data Keuangan Daerah dan Data Non Keuangan Daerah yang terverifikasi</i>	<i>100%</i>	
Kebijakan Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah	24	1.706.340.000
<i>1. Indeks Penyelesaian Peraturan di Bidang Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah</i>	<i>100%</i>	
<i>2. Persentase Penyelesaian Kajian Yang Disetujui oleh pejabat Eselon II</i>	<i>100%</i>	
<i>3. Persentase Penyelesaian Permasalahan Terkait DOB</i>	<i>100%</i>	
1. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2	12.775.000
2. Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan	2	213.288.000
3. Perumusan Kebijakan Daerah Otonom Baru	1	114.839.000
4. Penyusunan Peraturan terkait Konversi Penyaluran DTU dalam bentuk Non Tunai	1	4.080.000
5. Penyusunan Kajian Keseimbangan Pendanaan Daerah untuk Dekon TP	1	26.861.000
6. Penyusunan Kajian Anggaran, Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah	16	386.018.000
7. Evaluasi Kebijakan Keuangan Daerah	3	446.953.000
8. Peningkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	75.110.000
9. Pengumpulan dan Verifikasi Data Non Keuangan Daerah	1	426.416.000
Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	1.197.134.000
<i>1. Ketersediaan Data Keuangan Daerah Dan Non Keuangan Daerah yang lengkap, mutakhir dan akurat</i>	<i>100%</i>	
<i>2. Persentase Daerah Yang Memiliki APBD Yang Berkualitas</i>	<i>95%</i>	
<i>3. Persentase pemenuhan kewajiban penyampaian APBD</i>	<i>100%</i>	
1. Pengumpulan dan Verifikasi Data APBD	4	1.041.275.000
2. Penyusunan Statistik Deskriptif Keuangan dan Perekonomian Daerah	1	38.065.000
3. Penilaian Kesiapan Daerah Otonom Baru	1	117.794.000
Sistem Informasi Keuangan Daerah	4	1.788.873.000

RENJA 2019 ALOKASI ANGGARAN	Volume	2019
<i>1. Persentase Pengembangan Dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah</i>	100%	
<i>2. Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu</i>	100%	
<i>3. Persentase Pertukaran Data melalui Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan</i>	100%	
<i>4. Tingkat Down time sistem TIK</i>	0,35%	
1. Penatakelolaan SIKD	1	53.715.000
2. Pengembangan SIKD	4	754.765.000
3. komunikasi, informasi dan edukasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	509.501.000
4. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Internal	2	303.760.000
5. Penatakelolaan Basis Data dan Informasi DJPK	1	9.776.000
6. Pelayanan Infrastruktur dan Keamanan Sistem	4	157.356.000
Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah	47	11.835.642.000
Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan Daerah yang Konstruktif, Adil dan selaras dengan Kebijakan Nasional		
<i>Persentase PAD terhadap total pendapatan APBD</i>	20%	
Kebijakan Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan Daerah	2	1.553.418.000
<i>1. Indeks Penyelesaian Peraturan di Bidang Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah</i>	100%	
<i>2. Persentase Penyelesaian Kajian yang disetujui oleh eselon II</i>	100%	
1. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan terkait Pendapatan Asli Daerah	1	169.527.000
2. Penyusunan Kajian di bidang Pendapatan Asli Daerah	12	190.619.000
3. Penyempurnaan Konsepsi RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	1.193.272.000
Evaluasi dan Peningkatan kapasitas keuangan daerah	34	1.152.344.000
<i>1. Persentase pemenuhan kewajiban Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota</i>	92%	
<i>2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Atas Permasalahan PDRD</i>	100%	
<i>3. Persentase ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi atas evaluasi Raperda PDRD</i>	100%	
<i>4. Persentase Ketepatan Penyetoran Pajak Rokok</i>	100%	
1. Evaluasi dan Sinkronisasi Raperda dan Perda PAD	1	543.446.000
2. Evaluasi Penggunaan Pajak Rokok	30	140.293.000
3. Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah	1	217.405.000
4. Penyusunan Program profiling Wajib Pajak Daerah	1	206.140.000
5. Mediasi Asosiasi dan Pemda terkait permasalahan PDRD	1	45.060.000
6. Peningkatan Potensi PAD melalui Profiling dan pertukaran data		
Layanan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	11	9.129.880.000
<i>1. Tingkat efektivitas Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan bimbingan teknis</i>	70%	
<i>2. Persentase peningkatan jumlah daerah yang menerapkan e-government.</i>	5%	
<i>3. Tingkat kepuasan peserta bimtek terhadap pengajar</i>	60%	
1. Pelaksanaan Knowledge Sharing Kepala Daerah Berprestasi	1	584.140.000
2. Penyusunan Bahan Ajar, Modul dan Kurikulum Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	7	158.450.000
3. Pelaksanaan Coaching of Coach	1	281.460.000
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis level Executive	1	1.242.740.000
5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Reguler perpajakan	1	198.635.000
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Reguler Non Perpajakan	1	198.075.000
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Bimtek Keuangan Daerah di Daerah	1	170.870.000
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bimtek	1	124.230.000
9. Pembentukan <i>Center of excellence</i> program bidang keuangan daerah	7	6.171.280.000
Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan	442	11.545.205.000
Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan non dana perimbangan yang transparan, adil dan proporsional		
<i>Persentase alokasi dana desa kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi terhadap pagu anggaran dana desa</i>	25%	
Kebijakan Pembiayaan Dan Transfer Non Dana Perimbangan	232	2.060.498.000
<i>1. Indeks Penyelesaian Peraturan di Bidang Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan</i>	100%	
<i>2. Persentase Penyelesaian Kajian yang disetujui oleh eselon II</i>	100%	
1. Perencanaan dan Penyusunan Resource Envelope Kebijakan Non Dana perimbangan	1	128.300.000
2. Pengolahan data dan pembahasan dengan stakeholder	4	6.660.000
3. Penghitungan Alokasi Non Dana Perimbangan	4	142.410.000
4. Penetapan Alokasi dan Penyusunan Peraturan tentang Non Dana Perimbangan	1	269.180.000
5. Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Defisit APBD	2	168.840.000
6. Penyusunan Perjanjian Hibah/Penerusan Hibah Daerah	225	242.280.000
7. Penyusunan Kebijakan terkait Reward kepada Daerah	1	143.070.000

RENJA 2019 ALOKASI ANGGARAN	Volume	2019
8. Penyusunan Peta Kemampuan Keuangan Daerah	1	114.725.000
9. Penyusunan Kebijakan Penyaluran TKDD	1	55.260.000
10. Penyusunan Kajian Transfer Non Dana Perimbangan	14	148.310.000
11. Pemingkatan Desa (PU)	1	503.955.000
12. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penggunaan DTI Papua dan Papua Barat	1	77.762.000
13. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran TKDD dan Hibah Daerah	1	59.746.000
Layanan Pembiayaan Dan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa	60	8.044.707.000
<i>1. Persentase Alokasi Kategori Kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah terhadap total Dana Insentif Daerah</i>	10%	
<i>2. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN Yang Telah Ditindaklanjuti</i>	89%	
<i>3. Persentase penyaluran hibah ke daerah terhadap permintaan penyaluran tepat waktu dan tepat jumlah</i>	100%	
<i>4. Persentase Efektivitas Sosialisasi Dana Desa</i>	60%	
1. Perencanaan dan Pelaksanaan Penyaluran TKDD dan Hibah	2	80.180.000
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pembiayaan, hibah dan Transfer Non Dana Perimbangan	1	983.288.000
4. Penatausahaan dan Penyusunan LKTD dan Laporan Hibah Daerah	24	146.145.000
5. Pelaksanaan Tindak Lanjut temuan Aparat Pengawas	2	43.250.000
6. Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran TKDD dan Dana Desa	1	256.754.000
7. Penyusunan Analisis Laporan Keuangan Daerah	1	72.820.000
10. Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Dana Keistimewaan DIY	3	83.060.000
11. Diseminasi Dana Desa	25	5.558.925.000
15. Pengembangan Creative Financing untuk Percepatan Penyediaan Layanan Publik	2	820.285.000
Kemitraan Pemerintah, Pengusaha, dan Kelompok Usaha Desa	150	1.440.000.000
<i>Implementasi Kegiatan Kemitraan Pemerintah, Pengusaha, dan Kelompok Usaha Desa</i>	100%	
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kemitraan Tahun 2018		510.211.000
xxx penentuan desa mitra		
2. Pelaksanaan Kemitraan		749.990.000
3. Finalisasi Kemitraan		179.799.000
xxx pendampingan desa mitra		
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan	3	69.826.618.000
Menjadi Penggerak Sumber Daya yang Profesional untuk Mewujudkan Visi DJPK		
<i>1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan</i>	84	
<i>2. Indeks kualitas laporan keuangan BA 015</i>	4	
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	13.568.442.000
<i>Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Tandar Kompetensi Jabatan</i>	100%	
<i>Persentase implementasi inisiatif RBTK</i>	92%	
Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	2	554.390.000
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	1	152.728.000
Pengelolaan data dan informasi	1	319.151.000
Pengelolaan perbendaharaan	2	332.427.000
Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	2	814.045.000
Pengelolaan kepegawaian	7	5.599.899.000
--> Penggerak fiskal dan perekonomian di daerah dan desa (IDS)		
Pelayanan umum dan perlengkapan	1	1.719.270.000
Pelayanan humas dan protokoler	1	2.083.484.000
Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	2	1.993.048.000
Layanan Sarana dan Prasaran Internal	1	4.427.095.000
<i>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran</i>	95%	
1. Pengadaan Kendaraan Bermotor	2	714.581.000
2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	1	1.384.513.000
3. Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran	1	694.158.000
4. Renovasi gedung dan bangunan	1	1.633.843.000
Layanan Perkantoran	1	51.831.081.000
<i>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran</i>	95%	
1. Gaji Dan Tunjangan	1	32.870.548.000
2. Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1	18.960.533.000

Sekretaris Ditjen

RENJA 2019 ALOKASI ANGGARAN	Volume	2019
-----------------------------	--------	------

 Rukijo *sbw*